



Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Gigih Bangun Swasono ^{a,1*}, Budiyo ^{b,2}

^{abc} Universitas PGRI Madiun, Indonesia

¹ nusinuswantari@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 15 November 2020

Revised: 18 Desember 2020

Accepted: 1 Januari 2021

Kata-kata kunci:

Kepala Desa;

Kepemimpinan;

Pemberdayaan Masyarakat;

Kesejahteraan.

Keywords:

Head of Village;

Leadership;

Community Empowerment;

Welfare.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini terarah dengan berfokus pada peran pemimpin kepada desa pada kelompok tani “Bale Makmur” di desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Peran kepada desa sebagai pemimpin secara nyata, membuat masyarakat desa sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Pemerintahan Desa, membuat kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, desa mempunyai kewenangan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat. Metode penelitian menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* di mana peneliti mengambil tujuh responden untuk dijadikan sampel yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok tani di Desa Ngadisanan sudah dilakukan dan terus diterapkan kepada kelompok tani. Hal ini disebabkan karena adanya faktor peran kepemimpinan kepala desa yang aktif dan responsif.

ABSTRACT

The Role of Village Head Leadership in Community Empowerment. *The purpose of the research is to describe the role of village head leadership in community empowerment. This research was focused on the role of leaders to the village in the farmer group "Bale Makmur" in Ngadisanan village, Sambit District, Ponorogo Regency. The role of the village as a real leader, makes the villagers prosperous. Law No. 6 of 2014 Article 2 on Village Government, making policies on villages in providing services, increasing the role and empowerment of village communities aimed at the community. In the context of regional autonomy, the village has authority in matters related to basic needs and business development needs of the community. Research method using descriptive-qualitative data analysis. Data collection techniques using interviews. Sampling techniques used purposive sampling in which researchers took seven respondents to be sampled to suit the needs of researchers. The results showed that the empowerment of farmer groups in Ngadisanan Village has been carried out and continues to be applied to farmer groups. This is due to the active and responsive leadership role of the village head.*

Copyright © 2021 (Gigih Bangun Swasono & Budiyo). All Right Reserved

How to Cite : Swasono, G. B., & Budiyo. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(1), 21–25. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/26>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 dalam Kushandajani (2016) tentang Pemerintahan Desa, membuat kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, Desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat.

Melihat kondisi masyarakat di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang sebagian besar bekerja sebagai petani, maka penghasilan mereka bergantung pada hasil panen padi. Kenyataan yang harus diakui bahwa hasil panen padi di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo relatif menurun karena hasil panen yang relatif kecil, sehingga kehidupan keluarga para petani relatif di bawah sejahtera.

Jumlah penduduk miskin di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 berjumlah 281 orang, maka dari itu keberadaan Pemerintah termasuk Pemerintahan Desa memainkan fungsi dan peran penting dalam menyediakan pelayanan maupun perannya untuk pemberdayaan masyarakat khususnya pada kelompok tani, peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok tani untuk mewujudkan petani yang berdaya dapat dioptimalkan dengan mengupayakan berbagai cara yang dapat memberdayakan kelompok tani termasuk kelompok tani di Desa Ngadisanan.

Kepemimpinan Kepala Desa adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, membina, melindungi, memberi teladan, memberikan dorongan, dan memberikan bantuan demi tercapainya tujuan. Kepala Desa memiliki pengaruh dalam pemberdayaan kelompok tani sebab Kepala Desa memiliki wewenang melakukan perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pemberdayaan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Di sini, para petani dilatih untuk tidak konsumtif (Gultom, 2019).

Pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Selaras dengan pembangunan pertanian, tujuan pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (*better living*).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai keadaan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Wardani, 2019). Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Waktu Penelitian Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama 4 bulan. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian *sampling purposive* berdasarkan pengamatan empiris (Sugiyono, 2017). Secara umum penelitian ini akan dilaksanakan dengan tiga tahap kegiatan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan dengan analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yaitu (1) reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kepemimpinan didefinisikan sebagai “kemampuan untuk menekankan hasrat pemimpin terhadap orang yang dipimpin dan mendorong kepatuhan, penghargaan, loyalitas, dan kerjasama” (Peter, 2013:

2). “Kepemimpinan”, demikian menurut Kartini Kartono (2005: 6) “adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin”. Definisi utama tentang kepemimpinan sebagai perilaku mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan bersama yang menggambarkan kepemimpinan sebagai tindakan oleh orang-orang untuk mempengaruhi orang lain dalam arah yang sama.

Kepemimpinan merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Rangkaian itu berisi kegiatan menggerakkan, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam berbuat sesuatu, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Kepemimpinan akan berlangsung efektif, bilamana mampu memenuhi fungsinya, meskipun dalam kenyataannya tidak semua tipe kepemimpinan memberikan peluang yang sama untuk mewujudkannya. Dalam hubungan itu sulit untuk dibantah bahwa setiap proses kepemimpinan juga akan menghasilkan situasi sosial yang berlangsung didalam kelompok/organisasi masing-masing.

Indikator kepemimpinan kepala desa berfungsi memiliki beberapa indikator yaitu: (1) pertemuan yang diadakan kepala desa untuk membicarakan masalah pembangunan; (2) ide-ide kepala desa yang dapat diterima menjadi keputusan rapat; (3) anjuran atau saran-saran yang diberikan kepala desa; (4) pelaksanaan gotong royong atau kerja bakti kepala desa (Musriadi, 2012). Kepala desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan pemberdayaan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pemberdayaan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu- pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka ikut berperan aktif secara terpadu bekerjasama dengan Kepala Desa sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pemberdayaan desa yang telah di programkan.

Mardikanto dan Soebianto (2013: 100) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis pada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang sering kali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Sedangkan menurut Suharto (2014: 59-60) Pemberdayaan adalah “serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan”.

Selaras dengan pembangunan pertanian, tujuan pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (*better living*). Menurut Suharto (2014: 67-68) strategi pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan).

Menurut Soeharto dalam Firmansyah (2012: 174), ada 4 indikator pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut: (1) tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*); (2) tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*); (3) tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*); (4) tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*power with*). Kegiatan pemberdayaan, menurut Mardikanto dan Soebianto (2013), dalam suatu organisasi, merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari, pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik-awal perlunya pemberdayaan.

Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan. Ketiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan. Keempat, peningkatan peran atau

partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat atau perbaikannya. Kelima, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan. Keenam, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan. Ketujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Kepala desa memiliki peran penting untuk menjalankan kelima kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang digagas oleh Mardikanto dan Soebianto. Peran kepala desa menumbuhkan keinginan atau dalam pemberdayaan, ada kesadaran masyarakat desa untuk memperbaiki desanya secara umum, dan kebutuhan hidup secara pribadi. Bila kesadaran masyarakat bisa ditumbuhkan dalam konteks kebersamaan, maka kepala desa bisa mengordinir mereka dalam program kerja dalam bentuk tindakan-tindakan yang sesuai dengan visi-misi desa. Kesadaran pada masyarakat desa menjadi titik awal dari pemberdayaan yang nantinya bisa mencapai kesejahteraan.

Peran kedua dari kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa menumbuhkan kemauan dan keberanian. Di sini, kepala desa memiliki peran lebih pada peran seorang fasilitator. Kemauan dan keberanian untuk maju perlu menyediakan fasilitas dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat secara kelembagaan. Peran ketiga dari kepala desa adalah mengembangkan kemauan masyarakat desa terutama untuk mengajak mereka melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya. Peran Kepala Desa dalam memberikan pembinaan dan pengayoman serta melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya kepada masyarakat. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat supaya masyarakat mempunyai keterampilan dalam bidang tersebut serta memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk mengembangkan beragam potensi dan nilai-nilai kebudayaan yang ada di desa. Karena peran dan fungsi kepala desa memberikan dukungan dan memfasitasi terhadap apa yang menjadi kegiatan pemuda dan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Pemberdayaan kelompok tani di desa Ngadisanan, dengan demikian dijalankan dengan mengajak peran serta masyarakat desa dan elemen-elemen organisasi desa untuk membangun serta menyejahterakan desa. Upaya memberdayakan terutama di sini lebih pada faktor membangun kualitas dari kepala desa untuk memiliki dan mengambil peran serta memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan di sini dilakukan dan diterapkan bagi masyarakat desa, baik pada kepala kelompok tani, dan kelompok lainnya yang dilakukan dengan peran kepemimpinan dari kepala desa secara aktif dan responsif.

Simpulan

Penelitian mengenai peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi Pada Kelompok Tani “Bale Makmur” di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2020), maka penelitian ini dapat penulis simpulkan Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan kelompok tani di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ini sudah jelas yaitu dengan cara memberi pelatihan dan bantuan kepada kelompok tani di Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dan juga para petani lebih terbantu dalam hal menambah wawasan dan keahlian di bidang pertanian. Pemberdayaan kelompok tani dengan program utama pelatihan pembuatan pupuk organik ini sangat efektif dan bagus bagi para petani karena dengan adanya pelatihan ini menambah ilmu dan wawasan kepada kelompok tani agar lebih mandiri dalam menghadapi kesulitan pupuk pada saat ini. Hal ini juga dibenarkan oleh petani yang mengikuti pelatihan pupuk organik yang diberikan oleh Pemerintah Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo petani merasa senang dan pembuatan pupuk organik ini sangat mudah, bahannya juga mudah dicari lalu adanya program utama ini juga lebih membantu para petani.

Referensi

Anwas, M Oos. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi. Bandung: Alfabeta.

- Firmansyah, Hairi. 2012. Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin. Banjarmasin. *Jurnal Agribisnis Perdesaan*. Vol. 03, No. 2
- Gultom, A. F. (2019). Konsumtivisme Masyarakat Satu Dimensi Dalam Optik Herbert Marcuse. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 2(1), 17-30. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2018.002.01.2>
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Pemikiran Kierkegaard Tentang Manusia Agony dan Proses Penyembuhan Diri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 55-61. <https://doi.org/10.21067/jmk.v4i2.4087>
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Perubahan Identitas Diri Dalam Eksistensialisme Kierkegaard: Relevansinya Bagi Mental Warga Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 77-84. <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v9i2.8052>
- Hadari Nawawi & Martini Hadari, 2004. *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kartono, Kartini. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Kushandajani. 2016. Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No.1.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Potaboga, Jamin. 2015. Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Acta Duirna*. Vol. IV, No. 2.
- Peter G. Northouse. 2013. *Kepemimpinan: Teori dan Praktik*. Jakarta Barat. PT. Indeks.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2016. *Jurnal Riset Akuntansi*. Bandung: Program Studi Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia. Vol. VIII, No.2.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wardani, Silvia Yula. 2019. *Penelitian Kualitatif*. Madiun. Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Madiun.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Bab 1 pasal 1 ayat 2 Tentang Pemberdayaan Petani.